

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disertasi ini mengeksplorasi makna kekuasaan anggota DPRD Nias Selatan pada pemilihan umum tahun 2014. Hal ini berawal dari ketertarikan peneliti tentang dinamika politik di Nias Selatan. Setiap penyelenggaraan pemilihan legislatif diwarnai dengan berbagai kecurangan pemilu. Nias Selatan seperti laboratorium segala permasalahan dalam Pemilu. Hampir semua persoalan politik yang kerap menghambat pelaksanaan Pemilu di negeri ini bisa ditemukan di Nias Selatan.”¹ Pada pemilihan legislatif tahun 2009, aparat desa mencontreng surat suara untuk calon legislatif tertentu. Akibatnya, harus dilakukan pemungutan ulang di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara). Bahkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang semua kotak suara.²

Peneliti memiliki 2 alasan mengangkat tema makna kekuasaan. Alasan tersebut antara lain :

- Tema makna kekuasaan relevan dengan kondisi politik yang tengah terjadi di Nias Selatan. Peneliti mengambil fokus pemilu 2014 karena pada tahun tersebut terjadi kecurangan secara masif di setiap tahapan pemilu. Kecurangan tersebut seperti sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar dalam DPT, sehingga hal ini memungkinkan untuk memainkan hasil rekapitulasi karena banyaknya jumlah pemilih DPTb, adanya indikasi permainan

¹ *Harian Analisa*, 17 Juli 2014.

² *Harian Analisa*, 1 Agustus 2009.

untuk meloloskan bakal calon yang tidak melengkapi berkas-berkas pencalonan oleh KPU yang saat itu merupakan abang Bupati Nias Selatan, dipecatnya 4 komisioner KPUD Nias Selatan karena terbukti melakukan kecurangan dan 1 orang komisioner diberikan peringatan keras, adanya anak-anak yang memilih, pencoblosan surat suara dan merubah hasil berita acara kecamatan di atas kapal yang tengah berjalan dari Tello menuju pulau Nias. Kecurangan-kecurangan tersebut merupakan alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengangkat pemilu 2014 dengan beragam kecurangan yang luar biasa.

- Nias Selatan menjadi laboratorium tentang pelanggaran pemilu di Indonesia. berangkat dari asumsi yang terbangun tersebut penting untuk mengetahui bagaimana makna kekuasaan yang dirasakan elite atau secara khusus anggota DPRD Nias Selatan.

Makna kekuasaan yang dilihat dalam penelitian ini berupa proses konsolidasi terhadap konstelasi politik pada pemilu 2014 di Nias Selatan. Dilihat dari perspektif konstruksi sosial Peter. L. Berger, Pemilihan teori ini memberikan jawaban dari dinamika politik yang terjadi pada Pemilu 2014 di Nias Selatan. Teori konstruksi sosial (*social construction*) Berger dan Luckmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada

kehendak manusia; pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger, 1991:30-31).

Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger dan Luckmann, mendasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan *par excellence* sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (*paramount*). Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya (Berger, 1991:31).

Kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas dasar itulah kemudian Berger dan Luckmann menyatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal-sehat intersubjektif dibentuk (Berger, 1991:36).

Konstruksi sosial menyaratkan kemampuan berpikir secara logis dan nonlogis, dalam pengertian, berpikir secara “kontradiktif” dan “dialektis”. Peneliti diharuskan memiliki kemampuan mensintesisakan gejala-gejala sosial yang kelihatan kontradiktif dalam suatu sistem interpretasi yang sistematis, ilmiah, dan argumentatif. Konstruksi sosial menjelaskan adanya dialektika antara diri (*self*) dengan dunia sosio-kultural. Adapun dialektika ini berlangsung dalam satu proses dengan tiga “momen” simultan, yakni: (1) eksternalisasi: penyesuaian diri

dengan dunia sosiokultural sebagai produk dunia manusia (*“society is a human product”*), (2) objektivasi: interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, (*“society is an objective reality”*), dan (3) internalisasi: individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial, tempat individu menjadi anggotanya (*“man is a social product”*).

Berger dan Luckmann menyebut proses pemekaran produk sosial di masyarakat berlangsung secara dealektik. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan. Pertama, eksternalisasi, yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk dunia manusia (Berger, 1991:32)

Penerapan teori Berger ternyata tidak terbatas bagi analisis masyarakat secara makro serta pranata sosial yang besar, tetapi juga terhadap analisis kelompok kecil, misalnya: perkawinan antara suami dan istri, perilaku beragama, dan individu. Agama sebagai pranata sosial, tunduk pada proses yang juga dialami oleh pranata lainnya. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia, agama mengembangkan realitas objektif, dan dalam dunia moderen ini agama terus melanda dan dilanda manusia. Individu akan memilih, menimbang, dan kemudian menentukan hal-hal mana yang akan memuaskan kebutuhannya. Persoalannya adalah bahwa dalam kehidupan beragama misalnya, seringkali seseorang memilih akan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya telah diciptakan (*constructed*) sebelumnya.

Pemekaran Nias induk menjadi kabupaten Nias Selatan membuka peluang elite baru seperti munculnya elite politik partai, elite budaya dan elite ekonomi yang berupaya memperkuat diri untuk kompetisi pemilu legislatif 2004 maupun

persiapan menuju pilkada langsung 2005. Dalam hal ini ada beberapa pola kekuasaan elite yang dapat diamati, yaitu :

1. Pola pasca pemekaran 2003, muncul elite politik baru yang bersaing menghadapi pemilu 2004
2. Pola elite ekonomi yaitu yang memanfaatkan kekuatan modal ekonomi sebagai kekuatan untuk membangun basis politik menghadapi pemilu 2004
3. Pola elite budaya yang memanfaatkan jaringan budaya untuk memperkuat posisi dengan mengutamakan aspek simbol-simbol budaya sebagai sumber kekuatan massa politik.
4. Pola elite kekerabatan yaitu munculnya elite politik yang memanfaatkan jaringan keluarga atau kerabat sebagai sumber kekuatan mobilisasi politik baru.

Awalnya seluruh wilayah kepulauan Nias berada di bawah satu pemerintahan yakni Kabupaten Nias. Kepulauan ini terdiri dari gugusan pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tidak semuanya dihuni manusia. Sebagian besar penduduk terpusat di pulau besar atau Nias induk. Sebelumnya pulau ini sangat terpencil yang dikelilingi oleh lautan dan prasarana yang minim.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1999, jumlah kabupaten di Indonesia meningkat tajam karena unit administratif lama dimekarkan untuk membuat unit administratif baru. Dari tahun 1999 sampai 2004, jumlah kabupaten meningkat dari 292 menjadi 434. Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabupaten Nias pada tahun 2003. Retorika kampanye tuntutan pemekaran kabupaten baru di seluruh Indonesia selalu menyebut tiga alasan utama, yakni pemekaran akan lebih

mendekatkan pemerintah dengan rakyat, akan menguntungkan kemakmuran ekonomis, dan pemekaran adalah kehendak rakyat untuk memiliki kabupaten sendiri. (Jacqueline, 2007:117)

Pemekaran Kabupaten Nias Selatan dibarengi dengan pemekaran lembaga legislatif dan eksekutif baru. Pemekaran lembaga-lembaga tersebut memberi peluang bagi munculnya elite lokal Nias Selatan untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif dan kepala daerah. Pertanyaannya kemudian, siapa elite lokal yang muncul dalam panggung politik di Nias Selatan setelah kabupaten ini dibentuk? Hasil kajian Hotmaria menunjukkan bahwa elite yang muncul dalam politik lokal di Nias Selatan pasca pemekaran adalah aktor-aktor yang sebelumnya berdomisili di luar Nias Selatan. Mereka lahir di Nias Selatan, tapi telah lama tinggal di luar kabupaten baru tersebut. Lebih lanjut Hotmaria mengemukakan bahwa kebanyakan dari elite politik lokal itu merupakan tokoh-tokoh pemekaran, namun Hotmaria tidak menjelaskan latar belakang atau asal-usul dari elite politik tersebut (Tampubolon, 2010:16).

Berbicara mengenai pemekaran Kabupaten Nias Selatan, mulai dari ide, proses perjuangan hingga terbentuknya kabupaten Nias Selatan sebagai daerah otonom yang baru merupakan serangkaian peristiwa yang begitu dekat dengan peneliti. Hal ini karena peneliti termasuk satu dari sembilan tokoh pemekaran Kabupaten Nias Selatan.

Isu strategis (*strategic issue*) yang menjadi asumsi dasar para tokoh pemekaran Kabupaten Nias Selatan ialah ketertinggalan pembangunan dan ketidakmerataan pembangunan di wilayah bagian selatan. Hal ini terlihat masih banyak di wilayah tersebut yang belum menikmati listrik dan hidup dibalik

gunung dengan akses jalan yang tidak memadai. Isu tersebut dapat dipahami karena realitas yang terjadi cukup memprihatinkan, dibandingkan Nias bagian utara.

Isu ketertinggalan sangat dekat dengan isu desentralisasi. Desentralisasi telah mengubah proses untuk merundingkan kembali batas-batas sosial dan politik di berbagai arena yang saling terkait. Masing-masing dengan fokus dan kepentingan sendiri. Konteks inilah yang coba dipertegas oleh para pemrakarsa Kabupaten untuk kembali memperlihatkan batas-batas yang ada, sejauh mana bentuk ketertinggalan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemahaman di atas maka pemilihan Konstruksi Sosial sebagai teori utama dalam penelitian ini sesuai dengan fakta yang ingin dilihat dalam dinamika politik di Nias Selatan Pada pemilihan legislatif 2014. Kondisi tersebut terlihat dari kecurangan dilakukan dengan berbagai cara. Menurut sebuah surat kabar lokal, ribuan surat suara dicoblos oleh kelompok massa untuk salah satu calon legislatif di Kecamatan Teluk Dalam. Ada pula calon legislatif yang bermusyawarah dengan anggota KPPS untuk menentukan pembagian-pembagian suara. Bahkan anak-anak turut dimobilisasi untuk mencoblos calon legislatif tertentu.³ Karena terjadi berbagai kecurangan, pemilihan ulang harus dilakukan dipuluhan TPS.⁴

Kecurangan dalam pemilihan legislatif 2014 tidak dapat dilepaskan dari peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias Selatan dan para penyelenggara pemilihan di KPPS. Hal ini terbukti dengan diadilinya 11 orang

³ *Harian Analisa*, 17 Juli 2014.

⁴<http://www.nias-bangkit.com/2014/04/bawaslu-pemungutan-suara-harus-diulang-di-nias-selatan>, diakses 12 Februari 2015.

Ketua KPPS di Pengadilan Negeri atas dakwaan melanggar Undang-Undang Pemilu,⁵ dan diberhentikannya empat Komisioner KPUD Nias Selatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁶ Keterlibatan Komisioner KPUD dalam kecurangan pemilu ditenggarai oleh kepentingan Bupati Nias Selatan, Idialisman Dachi, menempatkan anggota keluarga dan kroni-kroninya menjadi anggota legislatif. Pada proses seleksi Komisioner KPUD Nias Selatan, Bupati memiliki peran penting menempatkan abangnya, Fansolidarman Dachi, sebagai Ketua KPUD, bahkan empat komisioner lainnya dapat terpilih karena kedekatan dengan bupati.

Pemilihan legislatif 2014 telah mengantarkan empat keluarga inti bupati menjadi anggota DPRD, dua orang menjadi anggota DPRD Nias Selatan, satu orang menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, dan satu orang lagi menjadi anggota DPR pusat. Posisi dan kekuasaan yang dimiliki salah satu anggota keluarga memudahkan calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa untuk bertarung dalam pemilihan legislatif. Pengaruh hubungan kekerabatan telah menjadi faktor dominan dalam upaya memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.

Kuatnya praktik politik kekerabatan dalam pencalonan legislatif di Nias Selatan menandakan bahwa bupati ingin memelihara geneologi politik di kalangan anggota keluarga sendiri. Bagi Elite politik lokal, menjaga geneologi politik itu amat perlu, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan strategis, yaitu merawat trah kekuasaan, menjaga keberlangsungan karir politik,

⁵<http://www.nias-bangkit.com/2014/05/kpu-nias-selatan-dinonaktifkan>, diakses 12 Februari 2015.

⁶<http://www.nias-bangkit.com/2014/06/4-komisioner-kpu-nias-selatan-diberhentikan>, diakses 12 Februari 2015.

serta mempertahankan penguasaan atas akses ke sumber-sumber ekonomi dan finansial.

Mengutip pandangan Sidel (1999) tentang bos lokal, Bupati Nias Selatan yang menjadi broker kekuasaan bagi klien politiknya di tingkat lokal dan orang yang paling berkuasa di Nias Selatan dalam mengeksploitasi sumber daya alam adalah wujud dari *boss local* (orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal) Orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal muncul melalui mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala. Dalam konteks Idialisman Dachi, ia adalah seorang anggota DPR pusat 2004-2009 dari Partai Pelopor sebelum menjadi Bupati. Pada pemilihan kepala daerah 2010, ia diusung Partai Golkar menjadi kandidat bupati dan memenangkan pemilihan dengan cara pembelian suara dan memanipulasi hasil suara. bahwa orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal dapat berpindah-pindah afiliasi partai politik dan berpindah-pindah patron di tingkat pusat. Ini menunjukkan jejaring orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal tidak statis dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Menempatkan kerabat dan kroni sebagai anggota legeslatif daerah, membentuk mesin politik sebagai broker suara, dan mengatur penempatan pejabat daerah adalah contoh strategi orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya.

Selain membangun dinasti politik, Bupati Nias Selatan juga mendorong sejumlah kerabatnya (kroni) untuk bertarung dalam pencalonan legislatif melalui berbagai partai politik. Calon legislatif yang menjadi kerabat atau kroni bupati mendapat kemudahan mengakses sumber kekuasaan untuk memenangkan pemilihan melalui KPUD. Mereka memiliki sumber daya yang lebih daripada

calon yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan bupati. Akan tetapi, hubungan bupati dengan kroni-kroninya tidak statis dan permanen, hal karena bupati selalu berpindah-pindah klien yang dapat memfasilitasi kepentingan ekonomi dan politiknya.

**Tabel 1.1 Kerabat dan Non Kerabat Bupati
Dalam Pemilu Legislatif 2014**

No	Nama	Hubungan	Partai	Keterangan
1	Suasana Dachi	Abang	Gerindra	Calon DPR RI terpilih
2	Wira Nehe	Ipar	PKB	Calon DPRD Sumatera Utara terpilih
3	Aris Agustus Dachi	Abang	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
4	Fatieli Dachi	Saudara	Golkar	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
5	Sidi Adil Harita	Non Kerabat	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
6	Yuliar Bidaya	Kerabat	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
7	Yeberkati Sarumaha	Kerabat	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
8	Asazatulo Giawa	Kerabat	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
9	Hasrat Laia	Kerabat	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
10	Yulinar Bidaya	Non kerabat	Gerindra	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
11	Siotaraizokho Gaho	Kerabat	PDIP	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
12	Sarozinema Laia	Kerabat	PDIP	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
13	Elisati Halawa	Kerabat	PDIP	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
14	Budieli Laia	Kerabat	PDIP	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
15	Aezisokhi Maduwu	Non Kerabat	PDIP	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
16	Yohana Duha	Kerabat	PKPI	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
17	Yurisman Laia	Kerabat	PKPI	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
18	Budirahman	Kerabat	PKPI	Calon DPRD Nias Selatan terpilih

	Maduwu			
19	Serius Halu	Kerabat	PKPI	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
20	Tuhoatulo Buulolo	Kerabat	PKPI	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
21	Ikhtira Telaumbanua	Non Kerabat	PKPI	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
22	Satulo Tafonao	Kerabat	Nasdem	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
23	Sokhiwanolo Waruwu	Kerabat	Nasdem	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
24	Faduhusa Laia	Non Kerabat	Nasdem	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
25	Dawido Bawamenewi	Kerabat	Golkar	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
26	November Nduru	Non Kerabat	Golkar	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
27	Sapotianus Manao	Kerabat	PBB	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
28	Fombagidodo Manao	Kerabat	Demokrat	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
29	Kariaman Maduwu	Kerabat	Demokrat	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
30	Legat Harita	Non Kerabat	PKB	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
31	Marthalena Duha	Non Kerabat	PKB	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
32	Nur Resmi Sarumaha	Non Kerabat	Hanura	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
33	Kariawan Bago	Kerabat	Hanura	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
34	Kasama Waruwu	Non Kerabat	Hanura	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
35	Sifao'ita Buulolo	Non Kerabat	PAN	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
36	Agustana Nduru	Non Kerabat	PAN	Calon DPRD Nias Selatan terpilih

37	Ya'aroziduhu Zamili	Non Kerabat	PAN	Calon DPRD Nias Selatan terpilih
----	---------------------	-------------	-----	----------------------------------

Sumber: Berita Acara Penetapan Perolehan Suara, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014; Wawancara, 1 Februari 2014

Salah satu jejaring bupati adalah ketua kelompok-kelompok pemuda di Nias Selatan, yakni Kariawan Bago (ketua Pemuda Pancasila) dan Yurisman Laia (ketua Ikatan Pemudan Karya). Kedua ketua kelompok pemuda itu merupakan orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal. Dia mencalonkan menjadi anggota legislatif tahun 2014. Orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal berusaha memperoleh ceruk kekuasaan dalam politik lokal ketika negara lemah mengontrol masyarakatnya. Kolaborasi orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal dengan birokrat (kepala daerah) dan politisi partai yang disebut sebagai segitiga akomodasi (*triangle of accomodation*) adalah strategi orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal untuk bertahan. Orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal, birokrat dan politisi partai membangun jejaring pertukaran sosial-ekonomi dan politik. orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal muncul karena kuatnya masyarakat, sementara orang yang memiliki pengaruh di tingkat lokal muncul dari dalam negara (Migdal,1988:24)

Kondisi menarik dari makna kekuasaan di Nias Selatan adalah penempatan kerabat Bupati Idealisman Dachi dalam susunan anggota DPRD Nias Selatan terpilih tahun 2014. Sesuai dengan Tabel 1.1. terlihat dari jumlah 35 anggota DPRD Nias Selatan terpilih sebanyak 23 orang merupakan kerabat bupati, sekitar 12 orang yang non kerabat. Hal ini memperlihatkan bagaimana makna kekuasaan menimbulkan konsolidasi atau penguatan pengaruh unsur primordial atau politik klan di tubuh DPRD Nias Selatan periode 2014-2019.

Makna kekuasaan menunjukkan bahwa struktur oportunitas yang bersifat kekuasaan, modal atau ekonomi, budaya dan kekerabatan atau dinasti dipakai para elite untuk penguatan basis politik mereka menghadapi pemilu legislatif 2014. Kombinasi pola posisi dan kekuasaan elite di Nias Selatan ini berimplikasi terhadap cara rekrutmen politik untuk pencalonan anggota legislatif. Artinya, sumber rekrutmen politik partai untuk calon anggota legislatif makin beragam dengan memanfaatkan jaringan sosial budaya calon-calon anggota legislatif. Dari sisi partai, sumber rekrutmen calon makin mengalami perluasannya dengan memanfaatkan tidak saja jalur struktur formal partai tetapi partai makin kreatif merekrut figur-figur elite ekonomi, sosial budaya untuk persiapan pencalonan pemilu legislatif 2014. Terjadi penguatan dan perluasan penggunaan dari sekedar basis ekonomi ke jaringan budaya dan atau kekerabatan untuk penguatan politik menghadapi pemilu legislatif 2009 dan 2014. Fenomena inilah yang kemudian mendasari praktek politik dinasti di Nias Selatan.

Keluarga dan kerabat (kroni) bupati yang mencalonkan diri memiliki sumber daya lebih unggul dibandingkan dengan calon legislatif yang lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana persaingan calon-calon legislatif itu dalam memperebutkan suara pemilih? Untuk menjawab pertanyaan itu dibutuhkan penelitian yang mendalam agar dapat memahami dinamika makna kekuasaan di Nias Selatan dalam memperebutkan dan memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, studi ini akan mengkaji hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan terkait dinamika politik yang tengah berkembang khususnya pada pemilu 2014, peneliti merasa tertarik untuk melihat lebih dalam makna kekuasaan anggota DPRD Nias Selatan. Hal ini merujuk pada konsolidasi

yang terjadi untuk melanggengkan kekuasaan di Nias Selatan. Bingkai pembahasan tersebut akan menarik jika dibahas menggunakan konstruksi berpikir Berger dalam memandang realitas, , manusia mampu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsennya-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari kehidupan bersama. Dengan kata lain pemahaman Berger memandang realitas membantu peneliti dalam melihat makna kekuasaan anggota DPRD di Nias Selatan periode 2014-2019. , setiap anggota DPRD mampu memanifestasikan dirinya dalam institusi. Proses manifestasi tersebut menarik jika dilihat dalam apa yang Berger sebut dengan Konstruksi sosial , untuk melihat sebuah bangunan sosial dari seseorang dapat dilihat dalam tiga tahap yakni objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi. Hal inilah yang membuat penelitian ini menarik untuk dibahas lebih dalam.

Berdasarkan apa yang disampaikan Berger terkait realitas, manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif maka motif atau tujuan seseorang terbentuk melalui proses konstruksi yang cukup panjang. Dalam hal ini peneliti percaya bahwa motif atau tujuan seseorang berada pada tampuk kekuasaan di DPRD Nias Selatan diperoleh melalui konsolidasi dengan lingkungan, masyarakat sebagai realitas empirik. Hal ini menjadi kunci bagi peneliti untuk menggunakan konstruksi sosial Berger dalam melihat makna kekuasaan anggota DPRD Nias Selatan pada pemilu 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi dasar masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut :

- Bagaimana konstruksi sosial Peter L. Berger menjelaskan proses makna kekuasaan anggota DPRD Nias Selatan pada pemilu 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengembangan deskripsi dan eksplanasi yang mendalam tentang makna kekuasaan anggota DPRD di Nias Selatan tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi instrumen dalam teori Berger yang dibangun oleh para ilmuwan sosial dan politik, khususnya perspektif konstruksi sosial Peter L Berger. Pada tataran praktis, studi ini dapat menjadi “cermin” bagi elite politik lokal di Nias Selatan untuk memahami dinamika politik di kabupaten tersebut dengan lebih tajam dan mendalam, serta dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi dan taktik yang lebih tepat.